



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BACHTIAR HASTIARTO
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 667448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/50 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 25.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 110 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 896.264

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 655.646.264

III. HUTANG Rp. 31.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 624.246.264

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERINA HASTUTI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 637277

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/36 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 159.500.000

1. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 (4X2) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 789.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 789.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIFTAH NURYANTO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632936

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/90 m2 di CILACAP, WARISAN Rp. 225.000.000
2. Tanah Seluas 468 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 134.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
5. MOTOR, YAMAHA BISON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 153.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ----**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 737.500.000**III. HUTANG** Rp. 80.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 657.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UMI FADILAH
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632926

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 819.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m²/343 m² di CILACAP, HIBAH TANPA AKTA Rp. 299.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1350 m²/1350 m² di CILACAP, HIBAH TANPA AKTA Rp. 310.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m²/840 m² di CILACAP, HIBAH TANPA AKTA Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 37.740.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.590.000
2. MOTOR, HONDA CB150R Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.700.000
3. MOTOR, HONDA VARIO150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
4. LAINNYA, POLIGON 24 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 2.950.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 104.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 27.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 987.740.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 987.740.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WARSID
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 693718

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	280.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/228 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	204.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ALL NEW ERTIGA GX MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEBEK SUPRA X Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	484.200.000
III. HUTANG	Rp.	71.856.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	412.344.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM****UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **CHANDRA HARTANTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **787163**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **240.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/84 m² di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **21.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **36.100.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **11.833.562****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **309.433.562****III. HUTANG** Rp. **176.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **133.433.562****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ETI PURWANTI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 787185

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.000.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	115.000.000
III. HUTANG	Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	65.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.